

# **PERAN PEREMPUAN DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)**

**Dina Novia Priminingtyas**  
**Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian**  
**Universitas Brawijaya Malang**

## **Abstract**

*The development of SMEs in Indonesia today is so fast, this proved to SME sector can survive during the economic crisis for more than 6 years. In addition, SME sector has been able to contribute to Gross Domestic Product (GDP), employment and increased exports in Indonesia.*

*Contribution of SME sector in improving Indonesia's GDP is also not escaped the role of women both as entrepreneurs (employers) as well as workers. The problems of women-managed SMEs are the lack of venture capital because of difficult access to bank credit. In addition, because the level of education and skills of women is very low, so that women-managed SMEs that suffer a lot. Therefore the government needs to provide guidance to women-run SMEs with the help of soft loans and equip with entrepreneurship and management training so that women-managed SMEs can thrive.*

*Key words: small medium micro enterprises, women*

## **Abstrak**

Perkembangan UMKM di Indonesia saat ini begitu pesat, hal ini terbukti dengan sektor UMKM mampu bertahan pada saat krisis ekonomi selama lebih dari 6 tahun. Selain itu Sektor UMKM telah mampu memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekspor di Indonesia

Kontribusi sektor UMKM dalam meningkatkan PDB Indonesia juga tidak luput dari peran perempuan baik sebagai pelaku usaha (pengusaha) maupun sebagai pekerja. Permasalahan UMKM yang dikelola perempuan adalah keterbatasan modal usaha karena sulit mengakses kredit bank. Selain itu karena tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan sangat rendah, sehingga UMKM yang dikelola perempuan banyak yang terpuruk. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan pembinaan kepada UMKM yang dikelola perempuan dengan bantuan kredit lunak dan membekali dengan pelatihan kewirausahaan maupun manajemen sehingga UMKM yang dikelola perempuan bisa berkembang dengan baik.

Kata kunci : usaha mikro kecil menengah, perempuan

## **1. PERKEMBANGAN UKM DI INDONESIA**

Sektor UMKM telah terbukti mampu hidup dan berkembang dalam menghadapi badai krisis selama lebih dari enam tahun. Keberadaannya telah dapat memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekspor. Berdasarkan data Badan Produk Domestik Bruto (PDB) Pusat Statistik (BPS) pada 2009, jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 520.220 unit, sedangkan jumlah koperasi sampai dengan pertengahan 2009 sebanyak 166.100 unit yang tersebar di seluruh Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan. ([www.suaramedia.com](http://www.suaramedia.com)).

Prospek bisnis UMKM dalam era perdagangan bebas dan otonomi daerah sangat tergantung pada upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengembangkan bisnis UMKM. Untuk mencapai iklim usaha yang kondusif ini, diperlukan penciptaan lingkungan kebijakan yang kondusif bagi UMKM. Kebijakan yang kondusif dimaksud dapat diartikan sebagai lingkungan kebijakan yang transparan dan tidak membebani UMKM secara finansial bicara berlebihan. Ini berarti berbagai campur tangan pemerintah yang berlebihan, baik pada tingkat pusat maupun daerah harus dihapuskan, khususnya penghapusan berbagai peraturan dan persyaratan administratif yang rumit dan menghambat kegiatan UKM. (Firdausy, 2000)

Tetapi permasalahan utama yang dihadapi UMKM adalah kesulitan dalam mengakses kredit untuk modal usaha. Hal ini disebabkan karena pihak perbankan menganggap UMKM tidak layak untuk mendapatkan kredit, karena sektor UMKM sulit berkembang dan adanya kekhawatiran terjadinya kredit macet.

Menurut Purwanto (2010), para pengusaha kecil menengah (UKM) mengalami kesulitan dalam mengakses kredit perbankan karena masih terjadi perbedaan perspektif antara sisi UKM dan sisi perbankan dalam pemberian kredit. Namun, tekanan yang dihadapi perbankan berupa semakin ketatnya persaingan dan semakin menipisnya keuntungan dari segmen korporasi (perusahaan besar), memaksa perbankan untuk masuk ke segmen UKM.

Padahal menurut data survey dari Departemen Koperasi menunjukkan bahwa kredit macet yang dialami oleh pelaku UKM dan sektor usaha lainnya tidak lebih dari 0,5% dari total hutangnya, sedangkan kredit macet oleh industri besar mencapai 70% dari total hutangnya. (Bappeko Malang, 2008)

Pada tahun 2007 pemerintah mencanangkan program untuk membantu pemberdayaan UKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR merupakan pemberian kredit lunak tanpa agunan dan diutamakan bagi UKM yang belum mempunyai akses kredit ke bank. Pemerintah telah bekerja sama dengan beberapa bank pemerintah dalam penyaluran KUR yaitu : BRI, Bank Mandiri Syariah, BNI, Bank Jatim, BTN Syariah dan Bank Bukopin. Dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UKM dan dengan kemudahan UKM dalam mengakses kredit perbankan diharapkan semakin memacu pertumbuhan UKM dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. (Priminingtyas, 2010)

## **2. PERAN PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN UMKM**

Kontribusi sektor UMKM dalam meningkatkan PDB Indonesia juga tidak luput dari peran perempuan baik sebagai pelaku usaha (pengusaha) maupun sebagai tenaga kerja. Meskipun tidak ada data yang pasti tentang UMKM yang dikelola perempuan, tetapi bisa dikatakan bahwa peran perempuan dalam pengembangan sektor UMKM sangat penting.

Menurut Sukes (2002) fenomena wanita bekerja untuk mencari nafkah terjadi karena dorongan kebutuhan, kemauan dan kemampuan serta kesempatan kerja yang tersedia dan akses wanita atas kesempatan tersebut. Status ekonomi wanita dilihat dari aktivitasnya dalam kegiatan mencari nafkah, akses terhadap faktor produksi, tingkat pendapatan yang dihasilkan dan kontribusinya terhadap pendapatan keluarga.

Peran perempuan di sektor UMKM umumnya terkait dengan bidang perdagangan dan industri pengolahan seperti : warung makan, toko kecil (peracangan), pengolahan makanan dan industri kerajinan, karena usaha ini bisa dilakukan di rumah sehingga tidak melupakan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. Meskipun awalnya UMKM yang dilakukan perempuan lebih banyak sebagai pekerjaan sampingan untuk membantu suami dan untuk menambah pendapatan rumah tangga, tetapi bisa menjadi sumber pendapatan rumah tangga utama apabila dikerjakan dengan sungguh-sungguh.

Dalam forum internasional seperti APEC disepakati agar masing-masing ekonomi memberikan perhatian bagi perkembangan perempuan pengusaha, khususnya pengusaha mikro, kecil dan menengah serta mendorong agar mengembangkan disintegrasikan data agar pembinaan dan pengembangan perempuan pengusaha yang adalah UMKM menjadi lebih terarah. Indonesia

sendiri yang menjadi anggota APEC belum banyak menindaklanjuti kesepakatan tersebut. Sampai saat ini, belum ada data yang jelas tentang jumlah perempuan pengusaha yang juga adalah tergolong UMKM sehingga upaya pemerintah dalam pemberdayaan terhadap perempuan di sektor UMKM masih dilakukan secara minimal. (Dipta, 2009)

### **3. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PEREMPUAN DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR UKM**

Permasalahan utama yang dihadapi UMKM adalah terkait dengan modal untuk pengembangan usaha. Umumnya pengelola UMKM kesulitan dalam mendapatkan akses kredit untuk modal usaha dari lembaga perbankan. Hal ini disebabkan karena pihak perbankan menganggap UKM tidak layak untuk mendapatkan kredit, karena sektor UMKM sulit berkembang dan adanya kekhawatiran terjadinya kredit macet. (Priminingtyas, 2010)

Sebagian besar sektor UMKM dikelola oleh perempuan, adakalanya perempuan juga multi peran dalam mengelola usahanya, dimana perempuan di samping sebagai manager juga merangkap sebagai pekerja. Oleh karena itu diperlukan pendidikan dan keterampilan dalam mengelola suatu usaha supaya bisa berkembang dengan baik. Tetapi realita yang ada di masyarakat, banyak perempuan dengan tingkat pendidikan rendah dan tidak mempunyai *skill* yang cukup baik dalam menjalankan usahanya sehingga usahanya banyak yang terpuruk.

Dengan tingkat pendidikan yang rendah, perempuan sulit untuk mengakses kredit dari lembaga perbankan. Apalagi persyaratan yang diminta pihak bank kepada UMKM untuk mengajukan kredit sangat banyak termasuk harus adanya jaminan. Jaminan yang disyaratkan pihak bank seperti sertifikat tanah, rumah dan surat kepemilikan kendaraan (BPKB), umumnya diatasnamakan suami. Perempuan tidak mempunyai kontrol terhadap sumberdaya yang ada, seperti : tanah, rumah dan kendaraan. Akibatnya banyak UKM yang dikelola perempuan terjerat dalam hutang rentenir yang sangat memberatkan sehingga usahanya mengalami kebangkrutan.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu UMKM yang merupakan kredit lunak tanpa jaminan untuk skim kredit kurang dari Rp. 5.000.000,00 tetapi pada kenyataannya pihak bank selalu meminta jaminan supaya pihak UKM mempunyai motivasi dalam menyelesaikan kewajibannya. Hal inilah yang menyebabkan sektor UKM sulit berkembang karena keterbatasan modal (Priminingtyas, 2010)

Untuk mengatasi masalah akses kredit untuk modal usaha yang dihadapi UMKM yang dikelola perempuan, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM, selain mengembangkan proyek yang khusus untuk pengembangan gender, sejak tahun 2006 telah diupayakan penguatan koperasi yang khusus dikelola oleh kaum perempuan melalui program PERKASSA (Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera). Dengan perkuatan masing-masing Rp.100 juta untuk setiap koperasi, pada tahun 2006 telah dibantu sebanyak 200 unit koperasi melalui pola konvensional (100 unit) dan pola syariah (100 unit) dengan nilai sebesar Rp. 20 milyar. (Dipta, 2009)

Menurut Saefudin (2008) Program Perempuan Keluarga Sehat Dan Sejahtera (PERKASSA) merupakan program perkuatan permodalan kepada Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi atau Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah atau Unit Jasa Keuangan Syari'ah koperasi yang dikelola dan beranggotakan sebagian besar perempuan. Perkuatan permodalan ini berupa bantuan pinjaman modal kepada koperasi untuk disalurkan kepada anggota dengan persyaratan tertentu dan mekanisme dana bergulir.

#### **4. PERKEMBANGAN UKM YANG DIKELOLA PEREMPUAN DI KOTA MALANG**

Data yang diperoleh dari BPS kota Malang menunjukkan jumlah Industri Kecil Menengah (UKM) di kota Malang pada tahun 2007 adalah 156 unit dan industri besar adalah 41 unit dari total industri di kota Malang adalah 197. Dari jumlah industri yang ada di kota Malang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 33.262 orang dan sebagian besar merupakan industri pengolahan tembakau yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 26.151 orang (Bappeko Malang, 2008). Dari data tersebut dipastikan bahwa lebih dari 80%, tenaga kerja dari industri pengolahan tembakau di kota Malang adalah perempuan dan umumnya perempuan sebagai buruh linting rokok dengan upah yang minim. Selain itu peran perempuan di sektor UKM di kota Malang juga terkait dengan bidang perdagangan dan industri pengolahan seperti : warung makan, toko kecil (peracangan) dan pengolahan makanan.

Untuk mendorong pemberdayaan UKM yang dikelola perempuan di kota Malang, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang terus menggenjot berdirinya koperasi wanita (Kopwan). Tidak hanya sekedar berdiri, eksistensi Kopwan juga terus dipertahankan dan ditingkatkan pelayanannya untuk anggota. Jika berkembang dengan baik akan ada tambahan modal Rp 25 juta

dari Pemprov Jatim. Sebelumnya, Kopwan di Kota Malang sudah mendapatkan bantuan modal Rp 25 juta dari Pemprov Jatim. Keberadaan Kopwan diharapkan dapat memerangi keberadaan bank titil yang sangat merugikan masyarakat kecil. Agar masyarakat, khususnya dapat lebih sejahtera bersama Kopwan. ([www.malangpos.com](http://www.malangpos.com))

Oleh karena itu dengan kebijakan dan program pemerintah dalam rangka pembinaan kepada UMKM yang dikelola perempuan melalui bantuan kredit lunak diharapkan sektor UMKM bisa tetap *survive* . Selain itu pemerintah juga perlu memberikan pelatihan kepada UMKM yang dikelola perempuan untuk meningkatkan keterampilan melalui pelatihan kewirausahaan maupun manajemen sehingga UMKM yang dikelola perempuan bisa berkembang dengan baik.

## **5. PENUTUP**

Sektor UMKM yang didominasi oleh perempuan mempunyai peranan penting dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja dan ekspor Indonesia. Permasalahan utama UMKM yang dikelola perempuan adalah keterbatasan modal usaha karena sulit mengakses kredit bank. Selain itu karena tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan sangat rendah, sehingga UMKM yang dikelola perempuan banyak yang terpuruk. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan pembinaan kepada UMKM yang dikelola perempuan dengan bantuan kredit lunak dan membekali dengan pelatihan kewirausahaan maupun manajemen sehingga UMKM yang dikelola perempuan bisa berkembang dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, 2010. **Jangan Remehkan UKM, Kontribusinya Sangat Besar**. Available online with up dates at <http://www.suaramedia.com/ekonomi-bisnis/usaha-kecil-dan-menengah> (Verified 20 April 2010).
- Anonymous, 2010. **Kopwan Prestasi Dapat Modal**. Available online with up dates at <http://www.malangpos.com/ekonomi-bisnis/usaha-kecil-dan-menengah> (Verified 20 April 2010).
- Bappeko Malang, 2008. **Rencana Induk Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dan Sektor Usaha Lainnya Kota Malang**. Bappeko, Malang.
- Dipta, I Wayan. 2009. **Mengangkat Peran Perempuan Pengusaha Dalam Mengatasi Pengangguran**. Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Jakarta.
- Firdausy, CM. 2010. **Prospek Bisnis UKM dalam Era Perdagangan Bebas dan Otonomi Daerah**. Available online with up dates at <http://www.duniaesai.com/ekonomi/eko5.html> (Verified 20 April 2010).
- Hendro dan Candra, 2006, **Be a Smart and Good Entrepreneur**, CLA Publishing, Bekasi
- Purwanto, 2010. **UKM Kesulitan Akses Kredit Perbankan**. Available online with up dates at <http://economy.okezone.com/read/2010/> (Verified 20 April 2010)
- .Priminingtyas, Dina Novia, 2010. **Akses Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Mendapatkan Kredit Usaha Dari Lembaga Perbankan Di Kota Malang**. Prosiding Seminar Internasional "*The Future of Small Businesses from Accounting, Management and Economics Perspectives*" Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Saefudin, Tamim. 2008. **Program Perempuan Keluarga Sehat Dan Sejahtera (Perkassa) Melalui Perkuatan Permodalan Koperasi Wanita**. Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Jakarta.